
S U L U K: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya

PARADIGMA POSMODERN SEBAGAI DASAR FILOSOFI PERILAKU BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA DI MASA PANDEMI

Indra Tjahyadi; Jiphie Gilia Indriyani

Universitas Panca Marga; UIN Sunan Ampel Surabaya
indratjahyadi@upm.ac.id; emailuntukjiphie@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini memfokuskan kajiannya pada paradigma posmodern sebagai dasar filosofi perilaku budaya masyarakat Indonesia di masa Pandemi COVID-19. Adapun kajian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi penerapan paradigma posmodern sebagai dasar pembentuk dan penguat imunitas kebangsaan masyarakat Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi pustaka. Pendekatan tersebut digunakan karena pengumpulan dan analisis data didasarkan pada tahapan studi pustaka. Temuan dari penelitian ini adalah 1) paradigma posmodern adalah sebuah paradigma yang muncul sebagai reaksi kritis atas kegagalan proyek modern, 2) penolakan dan penyangkalan terhadap metanarasi, monolitik, sistem konvensi dan kearbitraran, serta penolakan dan penyangkalan pada objektivikasi kebenaran, determinasi subjek dan pembatasan kebebasan merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam paradigma posmodern, 3) paradigma posmodern relevan untuk diterapkan sebagai dasar filosofi perilaku masyarakat Indonesia di masa Pandemi COVID-19 karena dapat membantu menguatkan nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Posmodern, kritisasi modern, budaya masyarakat Indonesia, COVID-19.

Abstract

This paper focuses its study on the postmodern paradigm as the basis for the philosophy of cultural behavior of the Indonesian people during the COVID-19 Pandemic. This study aims to determine the relevance of the application of the postmodern paradigm as the basis for shaping and strengthening the national immunity of the Indonesian people. The approach used in this study is metodeliterature review. This approach is used because data collection and analysis is based on the literature study stage. The findings of this study are 1) the postmodern paradigm is a paradigm that appears as a critical reaction to the failure of modern projects, 2) rejection and denial of metanarations, monoliths, convention and arbitration systems, as well as rejection and denial of the objectification of truth, subject determination and limitation of freedom. are elements contained in the postmodern paradigm, 3) the postmodern paradigm is relevant to be applied as the basis for the philosophy of Indonesian people's behavior during the COVID-19 pandemic because it can help strengthen national values in Indonesian society.

Key Words: *posmodern, modern critisation, Indonesia society, COVID-19*

Pendahuluan

Scott Lash (1990) menyebutkan posmodernisme sebagai istilah yang tersebar ke berbagai wilayah dan disiplin. Kata tersebut telah menjadi perbendaharaan ucapan sehari-hari, bahkan telah menjadi semacam klise yang terus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, posmodernisme menjadi topik perdebatan semenjak dekade 80-an. Para intelektual dan akademisi Indonesia seperti Yasraf Amir Piliang, Emmanuel Subangun, Rocky Gerung, Tommy F. Awuy, Ignas Kleden, dan sebagainya pernah membicarakan paradigma ini sebagai tema dalam artikel-artikel mereka.

Dalam sastra Indonesia, postmodern juga menjadi perbincangan yang intens. Dalam *Kondisi Postmodern Kesusastraan Indonesia* (2009) Ribut Wijoto, menjabarkan kondisi posmodernisme dalam kaitannya dengan studi sastra. Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, apakah posmodern itu?; bagaimanakah posmodernisme itu?; mengapa posmodernisme begitu menarik perhatian banyak intelektual dan akademisi?; dan apakah paradigma posmodernisme relevan digunakan sebagai dasar filosofi perilaku masyarakat Indonesia di masa Pandemi COVID-19? Tulisan ini tidak hanya mengkaji (paradigma) posmodernisme, tetapi juga bertendensi untuk mengetahui relevansinya sebagai dasar filosofi perilaku budaya masyarakat Indonesia di masa pandemi. Di Indonesia, era Pandemi COVID-19 dimulai pada Maret 2020. Situasi pandemi tersebut ditandai dengan pidato Jokowi, Presiden Indonesia, pada 15 Maret 2020, yang menginstruksikan masyarakat Indonesia untuk mulai melakukan kerja dari rumah, penjarakan sosial, dan penjarakan fisik (*Kompas.Com*). Sejak saat itu pola kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan.

Berbagai interaksi sosial, kontak fisik, dan kehidupan yang berlangsung di lingkungan luar rumah ditiadakan. Hal ini tentunya mengubah

cara pandang masyarakat Indonesia dalam menjalani sekaligus memaknai kepedulian sosial dengan melakukan interaksi sosial secara utuh, yakni fisik dan rohani, menjadi kepedulian terhadap diri sendiri adalah bagian penting dari kepedulian sosial. Usaha menyelamatkan kehidupan masyarakat Indonesia dimulai dari menyelamatkan kehidupan diri sendiri sebagai individu. Gotong-royong bukan lagi peristiwa fisik, tetapi lebih pada peristiwa rohani. Hal tersebut merupakan perubahan pandangan dunia yang radikal bagi masyarakat Indonesia yang mempercayai kebersamaan sebagai sesuatu yang meliputi fisik dan rohani. Berdasarkan fakta tersebut kajian ini memiliki nilai urgensi. Kesalahan dan ketidaktepatan dalam berperilaku akan berdampak pada terjadinya perpecahan dalam tatanan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang dapat memberikan kontribusi bagi penguatan dan ketahanan kebangsaan dan kenegaraan dalam kebudayaan masyarakat Indonesia di masa pandemi.

Metode Penelitian

Upaya untuk melakukan kajian mengenai posmodernisme dan relevansi paradigma tersebut sebagai dasar filosofi perilaku masyarakat Indonesia di masa Pandemi COVID-19, tulisan ini bersandar pada pendekatan studi kepustakaan. Studi pustaka memusatkan perhatiannya pada pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, artikel ilmiah, atau bahan-bahan tertulis yang terdapat di internet. Adapun analisis yang dilakukan atas data-data yang didapatkan dilakukan secara dialektis-kritis kemudian disajikan secara deskriptif. Tahapan penelitian ini meliputi: 1) pencarian data dari pelbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, dan bahan-bahan tertulis di internet; 2) peneliti melakukan pemilahan data sekaligus melakukan analisis dialektis-kritis dengan berbagai data yang didapat; dan 3) menyajikan

hasil analisis data dengan mendeskripsikan hasil temuan.

Hasil dan Pembahasan

Paradigma posmodern mulai dikenal dalam khazanah pemikiran dan kebudayaan di Indonesia sejak dasawarsa 1980-an. Dalam konteks historis, istilah posmodernisme muncul sejak dekade 30-an. Frederico de Oniz dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan istilah ini untuk menyatakan periode peralihan dari modernisme awal ke modernisme dengan kualitas lebih tinggi. Pada 1940-an istilah posmodernisme hadir dalam ranah arsitektur, baru pada 1960-an merambah ke ranah sastra (Muhadjir, 2001).

Namun posmodernisme baru menemukan momentum ketika Jean-Francois Lyotard menggunakan istilah ini dalam *La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir* pada 1977 (Muhadjir, 2001). Meskipun istilah tersebut telah mulai ramai diperdebatkan, posmodernisme masih menimbulkan ketidakpastian ontologis. Ketidakpastian tersebut tampak pada masih ramainya perdebatan mengenai pemahaman baku postmodernisme di ranah filsafat dan ilmu sosial-humaniora.

Lyotard (1984) menggambarkan posmodernisme sebagai kondisi pengetahuan pada masyarakat yang paling berkembang. Secara definitif, istilah tersebut dapat dipahami sebagai sebuah istilah yang pemaknaannya didasari oleh rasa ketidakpercayaan terhadap metanarasi yang menjadi narasi besar di balik pelbagai narasi yang bertebaran di berbagai ranah kebudayaan modern. Dalam kebudayaan modern, metanarasi merupakan "logos" yang memiliki legitimasi dan otoritas bagi kebenaran yang diamini oleh seluruh umat manusia modern. Metanarasi tersebut bersifat niscaya dan monolitik bagi manusia modern. Posmodernisme, bagi Lyotard, adalah sebuah konsep yang didasari pada rasa ketidakpercayaan terhadap keniscayaan dan

hal-ihwal yang monolitik.

Rasa ketidakpercayaan terhadap hal-ihwal keniscayaan dan kemonolitan merupakan sebuah kondisi. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang non-fisik, tetapi juga fisik. Rasa ketidakpercayaan hadir secara menyeluruh dan holistik dalam kehidupan manusia saat ini. Oleh karena itu, posmodernisme adalah kondisi, bukan sekedar konsep atau situasi yang dialami oleh manusia. Sehingga dapat disimpulkan posmodernisme merupakan sebuah kondisi dalam kehidupan manusia yang ditandai oleh rasa ketidakpercayaan terhadap keniscayaan dan hal-ihwal yang monolitik.

Kegagalan Proyek Modernisme dan Kebangkitan Posmodernisme

Memahami posmodernisme tidak dapat dilakukan tanpa memahami wacana yang mendahului, yakni modernisme. Modernisme merupakan fase sejarah dunia yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut: 1) kepercayaan pada sains, perencanaan, sekularisme dan kemajuan; 2) keinginan untuk simetri dan tertib; 3) keinginan akan keseimbangan dan otoritas; 4) keyakinan terhadap masa depan atau pada utopia yang bisa dicapai; dan 5) keyakinan akan sebuah tata dunia natural yang mungkin (Ahmed, 1992).

Proyek kemodernan hadir melalui mesin, proyek industri besar, besi, baja, dan listrik. Oleh karena itu, zaman modern dapat dipahami sebagai zaman industrialisasi dan zaman di mana kemanusiaan diremehkan. Melalui pengarahannya pada pengembangan ilmu ke pengembangan teori dan pengembangan paradigma atas dasar rasionalitas, modernisme telah mengendalikan manusia secara teknis dengan menggunakan prinsip-prinsip, sistem-sistem pembuktian, model-model logika, dan cara-cara tertentu dalam berpikir rasional (Muhadjir, 2001). Kondisi tersebut mengakibatkan manusia menjadi objek sistem,

bukan menjadi diri sendiri. Kondisi tersebut semakin parah karena modernisme memaknai rasionalitas ke dalam wacana kepentingan kerja kemudian direduksi menjadi efisiensi atas kriteria untung-rugi, lebih lanjut dijadikan sesuatu yang berupa pragmatik.

Perihal mengenai manusia menjadi objek sistem bukan menjadi diri sendirinya ini dapat dilihat secara jelas dalam konsep strukturalismenya Ferdinand de Saussure. Bagi Saussure (dalam Laclau & Mouffe, 1999) suatu hal baru bisa dipahami apabila ditempatkan dalam satu sistem tertentu yang bersifat arbitrer yang dibentuk berdasarkan konvensi.

Dalam modernisme identitas manusia sebagai subjek adalah sesuatu yang niscaya (Laclau & Mouffe, 1999). Keniscayaan ini hadir karena manusia berada pada dominasi yang arbitrer, sebab hanya di bawah dominasi yang arbitrer manusia dapat dipahami, dipelajari, dan dimaknai. Bagi para modernis Saussurean, dunia sebagai *langue*-lah yang penting. Pemosisian *langue* yang lebih penting ini, mengakibatkan manusia sebagai *parole* terdegradasi pada posisi yang lebih rendah. Di bawah kondisi ini, manusia bukan subjek yang bebas. Tidak adanya pengakuan *parole* mengakibatkan manusia sebagai subjek yang tidak selalu pasti tidak mendapatkan pengakuan.

Manusia, jika ditelisik lebih dalam dan jauh dalam wacana modernisme, bukan subjek bebas karena ia terikat pada hal-hal yang niscaya. Sebaliknya posmodern menjadi mutasi sekaligus kontinuitas modernisme (Hartono, 2007). Prefix “pos” di depan “modernisme” menyebabkan posmodernisme tidak bisa dipandang sebagai mutasi dari modernisme, tetapi ia juga harus dipandang memiliki kontinuitas dengan modernisme. Hal tersebut tampak pada pembagian periodik zaman Arnold Toynbee.

Toynbee (dalam Hartono 2007) menempatkan posmodernisme sebagai sebuah

era atau periode keempat sesudah Zaman Kegelapan (675-1075 M), Zaman Pertengahan (1075-1475), dan Zaman Modern (1475-1875). Periodisasi tersebut memperlihatkan posmodernisme sebagai kelanjutan Zaman Modern. Upaya untuk memahami posmodernisme tetap mengandaikan pemahaman mengenai modernisme. Hal tersebut disebabkan adanya keterkaitan antara Zaman Modern dan Zaman Postmodern. Karakter kontinuitas dan mutasi dari posmodernisme terhadap modernisme juga disampaikan oleh Appignanesi dan Garrat.

Bagi Appignanesi & Garrat (1997), yang dimaksud dengan posmodernisme adalah campuran dari pelbagai pemaknaan yang berdasar pada anggapan bahwa posmodernisme bukan sebuah paradigma yang hanya dihasilkan, diakibatkan atau anak, atau perkembangan modernisme. Posmodernisme juga penyangkalan dan penolakan terhadap modernisme. Paradigma tersebut merupakan kebingungan yang berasal dari dua teka-teki besar yaitu melawan dan mengaburkan pengertian modernisme, dan menyiratkan pengetahuan yang lengkap mengenai modernisme yang telah dilampaui oleh zaman baru. Dengan kata lain, posmodernisme adalah sebuah zaman yang mengandaikan adanya perubahan dalam cara melihat, berpikir, dan berbuat manusia.

Menurut Baudrillard (2006), sejak awal modernisme merupakan wacana dan proyek yang sangat ambisius. Paradigma tersebut diciptakan oleh Barat, dan didistribusikan oleh Barat ke seluruh penjuru dunia dengan pelbagai kiat. Bahkan, dalam pandangan yang negatif, ia didistribusikan oleh Barat ke seluruh penjuru dunia dengan menghalalkan pelbagai cara. Mulai yang halus, seperti hegemoni dan seduksi, sampai ke hal yang paling kasar dan tidak beradab seperti represi dan kolonialisme. Adapun tujuan paradigma tersebut membentuk dan menyebarkan keyakinan “kebenaran”

tunggal versi Barat. Faktanya paradigma modernisme--dengan utopia kemajuannya--hanya berakhir pada khayalan katastrofe. Ini tampak pada berbagai kekacauan dan kemerosotan kehidupan masyarakat modern. Pemahaman tersebut mendorong masyarakat manusia untuk melakukan penolakan dan kritisasi atas paradigma modern yang selama ini dianut. Hal tersebut berdampak pada perubahan masyarakat modern.

Kegagalan paradigma modern sebagai proyek pembentuk kesadaran masyarakat manusia juga dapat dilihat dalam pemahaman pasca-strukturalis. Bagi para posstrukturalis seperti Jean Jacques Lacan, Michel Foucault, ataupun Derrida, inilah titik kegagalan modernisme. Pengabaian pada *parole* merupakan pengabaian kepada manusia sebagai subjek yang menyeluruh. Dengan kata lain, menyitir pernyataan Deleuze dan Guattari, sebagai subjek yang menyeluruh, manusia bukan hanya makhluk rasional tetapi juga makhluk berhasrat (dalam Hartono, 2007).

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Laclau & Mouffe (1999) menyatakan sifat arbiter yang terdapat dalam paradigma modern merupakan sebetuk wacana hegemoni yang menempatkan manusia pada posisi yang determinan saja. Padahal manusia sebagai subjek tidak hanya mengandaikan sesuatu yang determinan, tetapi jugayangkontingen. Manusia adalah subjek yang senantiasa berada pada titik-titik antagonisme dan perjuangan. Ia adalah subjek yang terbentuk dari dua tataran, yakni yang determinan dan yang kontingen. Kedua tataran ini tidak dapat dilihat dalam sistem dominasi hirarkis, karena kedua memiliki kesejajaran. Kesejajaran kedua tataran tersebut berdampak pada munculnya gesekan-gesekan di antara keduanya. Gesekan-gesekan itulah yang mengakibatkan tidak dapatnya identitas manusia dilihat sebagai sesuatu yang niscaya. Identitas subjek manusia bukan sesuatu yang niscaya, tetapi sesuatu yang senantiasa mengalami antagonisme dan

perjuangan. Identitas manusia adalah sesuatu yang senantiasa mengalami redefinisi. Wacana modernisme gagal melihat hal ini. Kesadaran mengenai kegagalan proyek paradigma modernisme sebagai pembentuk kesadaran masyarakat manusia itulah yang menjadi penyebab munculnya paradigma posmodern dalam kesadaran masyarakat manusia saat ini.

Kritik Paradigma Posmodern terhadap Paradigma Modern

Paradigma posmodern mengkritik paradigma modern dalam banyak hal. Kritik paradigma postmodern terhadap paradigma modern, pertama, tampak pada pemahaman mengenai kebenaran ilmu pengetahuan. Paradigma modern mengarahkan ilmu ke pengembangan teori dan pengembangan paradigma yang didasarkan pada rasionalitas. Bagi posmodernisme, apa yang telah dilakukan oleh paradigma modern itu tidak tepat karena tindakan yang didasarkan pada paradigma tersebut justru menjadikan manusia sebagai objek sistem, bukan menjadi dirinya sendiri. Modernisme telah mengendalikan manusia secara teknis. Pengendalian manusia secara teknis ini dilakukan dengan jalan membuat manusia untuk menggunakan prinsip-prinsip, sistem-sistem pembuktian, model-model logika, serta cara-cara tertentu dalam berpikir rasional. Kondisi ini mengakibatkan manusia bukan menjadi subjek sistem, tetapi objek sistem, karena ia harus mematuhi setiap prinsip, sistem, model, cara yang ditentukan oleh modern (Muhadjir, 2001).

Menurut Muhadjir (2001), kepatuhan-kepatuhan tersebut justru tidak menempatkan manusia sebagai subjek penemu. Kepatuhan-kepatuhan yang diandaikan penting oleh paradigma keilmuan modern justru membuat manusia kehilangan kebebasannya. Manusia bukanlah berada posisi pencari, tetapi pada posisi penemu. Oleh karena itu, modernisme justru tidak menempatkan manusia sebagai

penemu kebenaran karena kebenaran itu sudah ada di sana, manusia tinggal menemukannya kembali. Maka di bawah kondisi posmodernisme, kebebasan manusia tampil dalam wujud manusia sebagai subjek pencari kebenaran.

Dalam posmodernisme tugas manusia adalah mencari kebenaran, bukan sebagai pembukti kebenaran. Kondisi ini karena posmodernisme tidak menawarkan kebenaran mutlak. Logosentrisme absolut yang diartikulasikan oleh modernisme ditolak dan dikritisi oleh posmodernisme. Logosentrisme yang ditawarkan oleh modernisme haruslah didekonstruksi. Keharusan ini muncul, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Lyotard, karena telah terjadi transformasi relasi antara sains dan kehidupan (Muhadjir, 2001).

Selain kritik mengenai paradigma keilmuan modern, postmodern juga melakukan kritisasi terhadap paradigma modern tentang manusia sebagai subjek. Laclau & Mouffe (1999) melihat paradigma subjek modern telah mendehumanisasi manusia sebagai subjek. Sehingga wacana keniscayaan yang didesak oleh hegemoni modernisme telah mengakibatkan munculnya krisis. Krisis ini berpusar pada retakan antara teori dan praktik. Sifat niscaya modernisme mengakibatkan teori tidak lagi akomodatif terhadap praktiknya. Akhirnya, modernisme gagal melihat, mempelajari, dan memahami dunia. Posmodernisme berusaha mengatasi krisis ini. Adapun krisis tersebut diatasi oleh posmodern dengan jalan mengembalikan manusia pada posisi subjek, bukannya objek. Modernisme pada abad 19 yang menonggak dengan strukturalisme telah menghilangkan manusia sebagai subjek. Strukturalisme, dengan pemujaan struktur, mengakibatkan munculnya dehumanisasi (Laclau & Mouffe, 1999).

Dehumanisasi ini terlihat pada wacana bagaimana manusia direduksi ke dalam struktur. Manusia hanya diakui sebagai objek

dari struktur, dan bukan pencipta struktur. Hal tersebut tampak pada konsep *langue* dan *parole* milik Saussure. Bagi Saussure, yang penting adalah *langue* bukan *parole*, sebab manusia hanya dapat dipahami dalam satu jaring yang lebih besar. Dengan kata lain, manusia hanya bisa dipahami dalam hubungannya dengan sistem yang mengitarinya. Posmodernisme, dipelopori oleh posstrukturalisme, menolak pandangan ini. Bukan *langue* saja yang penting, sebab tanpa *parole*, *langue* tidak akan ada. Jika begitu, *parole* merupakan unsur penting, karena keberadaannya menentukan *langue* dan bukan sebaliknya (Laclau & Mouffe, 1999).

Pemahaman semacam ini membuat posmodern menjadi alat untuk mengembalikan manusia sebagai subjek penting dalam kehidupan dan kebudayaan manusia. Manusia sebagai subjek, yang semenjak abad 19 lenyap dari khazanah pengetahuan, kembali ke kedudukannya yang penting. Oleh karena itu, bagi posmodernisme tidak ada kebenaran objektif, yang ada hanyalah kebenaran subjektif atau intersubjektif. Pemahaman kebenaran model ini menggiring munculnya kebhinekaan makna. Makna bukan lagi sesuatu yang hanya tunggal. Denotativitas makna bukan sesuatu yang mutlak. Makna adalah banyak, tergantung dari relasi dan subjek yang menentukan (Laclau & Mouffe, 1999).

Ketiga, kritik paradigma modern terhadap paradigma modern mengenai pemberian batas dalam kehidupan manusia. Melalui paradigma mengenai budaya media, posmodern mengkritik objektivikasi paradigma pembatasan kehidupan manusia modern. Menurut Appignanesi & Garrat (1997), kehadiran media publik dalam jaringan yang masif dalam kehidupan masyarakat posmodern merupakan representasi penolakan paradigma posmodern terhadap pemberian batas-batas antara yang riil dan yang-tidak-riil. Hal tersebut tampak keberadaan budaya *zapping* dalam masyarakat posmodern. *Zapping*-atau kesadaran nol-

merupakan gejala ketaksabaran posmodern tanpa kedalaman. Ia merupakan produk hiperaktivitas posindustrial dan kegelisahan ekstrem. Budaya ini muncul bersamaan dengan merebaknya kabel multialuran dan satelit pemancar, diikuti dengan bantuan tidak terelakkan dari kendali jarak jauh. Sisi menarik dari budaya *zapping* ini adalah adanya otokreasi tontonan yang menempatkan Anda sendiri menjadi pemiliknya (Appignanesi & Garrat, 1997).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Baudrillard. Menurut Baudrillard (dalam Imam, 2001; Piliang 1999) kehadiran media-media dalam jaringan yang bersifat publik dalam kebudayaan masyarakat posmodern merupakan upaya nyata posmodern dalam menolak paradigma pembatasan modern. Dalam kehidupan masyarakat posmodern tidak ada lagi batas antara yang nyata dan yang tidak nyata. Segala kehadiran telah melebur menjadi sebuah kenyataan baru, yakni kenyataan hiperealitas.

Hiperealitas tersebut berdampak pada pembentukan batas identitas yang dinamis pada masyarakat posmodern. Bagi masyarakat posmodern dengan tidak menolak hegemoni budaya media, berarti sekaligus melakukan resistensi dan pencarian lebih lanjut mengenai keberadaan manusia. Namun, hal tersebut mungkin dilakukan apabila masyarakat berada dalam kondisi posmodern, yakni sebuah kondisi yang mengagungkan kebebasan manusia. Kebebasan untuk mengonsumsi dan memproduksi sesuatu. Kebebasan untuk mencitrakan sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya sendiri (Baudrillard dalam Imam, 2001; Piliang, 1999).

Paradigma Posmodernisme dan Masyarakat Indonesia di masa Pandemi

Penolakan dan penyangkalan terhadap metanarasi, monolitik, sistem konvensi dan kearbitraran, serta penolakan dan

penyangkalan pada objektivikasi kebenaran, determinasi subjek dan pembatasan kebebasan merupakan unsur-unsur dalam posmodern mendorong paradigma ini untuk memosisikan keberagaman atau kebhinekaan menjadi sesuatu yang penting dalam kesadaran manusia. Kehidupan masyarakat haruslah didasarkan pada kesadaran kebhinekaan yang tetap mengutamakan humanitas manusia. Pengakuan atas kebhinekaan tersebut menggiring paradigma posmodern sampai pada wilayah yang dipenuhi oleh perayaan akan fragmentasi dan relativitas. Perayaan tersebut berdampak pada hadirnya kebhinekaan kebenaran.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia wacana Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*) pengakuan terhadap keberagaman kebenaran merupakan hal yang penting untuk disadari. Bhinneka Tunggal Ika merupakan wacana yang mengandung makna pengakuan terhadap pelbagai ras, suku, maupun agama yang berbeda-beda yang ada di Indonesia merupakan dasar pembentuk kesadaran dan perilaku masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia kehadiran paradigma posmodern justru faktor penting yang dapat membantu masyarakat Indonesia untuk memahami bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut hadir dalam kesadaran, sehingga dapat mengukuhkan identitas ke-Indonesia-an setiap masyarakat Indonesia.

Menurut Oetomo (2009), manusia Indonesia memang merupakan sesuatu yang menjadi tujuan hidup berbagai orang yang hidup bermasyarakat di wilayah Indonesia, yang entah bagaimana, bertautan dengan Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia berarti menyadari perbedaan asal-usul tidaklah penting, karena yang penting adalah keindonesiaan itu sendiri, dan keindonesiaan itu sendiri merupakan sesuatu tidak tunggal dan dapat tumpang-tindih atau bersentuhan

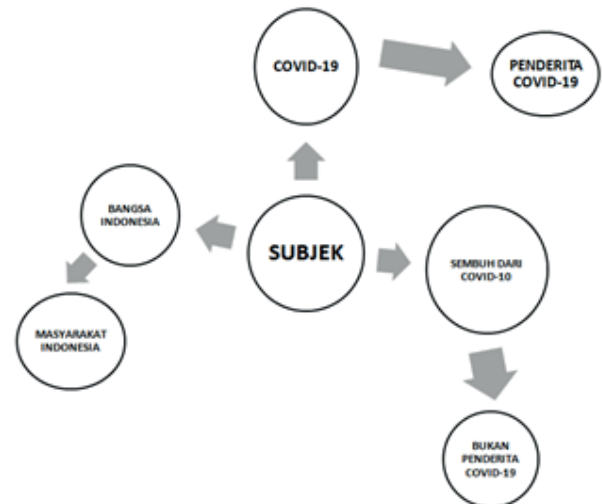
dengan entitas sosial-budaya lain. Jadi identitas manusia Indonesia bukanlah identitas yang berangkat dari ketunggalan. Identitas manusia Indonesia adalah kemajemukan dan bersandar pada kebhinnekaan.

Di masa pandemi COVID-19 kesadaran kebhinnekaan tersebut menjadi sangat penting. Kesadaran tersebut dapat meredam terjadinya konflik di masyarakat Indonesia dan diskriminasi sosial pada setiap anggota masyarakat Indonesia yang dikenai penanda sebagai subjek *suspect* COVID-19. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa paradigma posmodern mengandaikan kebhinnekaan dapat dibentuk karena adanya faktor identitas yang selalu terfragmentasi dan relatif. Identitas bukanlah sesuatu yang utuh, pasti, dan tidak terubahkan. Identitas adalah sesuatu yang senantiasa hadir parsial dan dibentuk melalui relasi antar penanda.

Identitas *suspect* COVID-19 adalah identitas yang relatif dan terfragmentasi. Hal tersebut karena pembentukan identitas tersebut mengandaikan adanya relasi antara subjek yang dikenai tanda dengan konteks penderita virus corona, dan identitas tersebut adalah identitas yang parsial, merupakan fragmen atau bagian dari sesuatu yang kompleks dan dinamis. Pada saat subjek direlasikan dengan konteks penderita virus corona, identifikasi yang dihasilkan dari relasi tersebut adalah subjek tersebut merupakan penderita virus corona. Namun, identitas subjek tersebut tidak bersifat menyeluruh. Identitas sebagai penderita virus corona yang dimiliki oleh subjek tersebut hanya bersifat parsial. Hal tersebut karena bila relasinya diubah, pemaknaan atas identitas tersebut akan mengalami perubahan. Apabila subjek tersebut direlasikan dengan konteks keberadaannya sebagai warga masyarakat Indonesia, pemaknaan identitas yang dimiliki oleh subjek tersebut adalah sebagai anggota masyarakat Indonesia yang memiliki nilai kebhinnekaan tetapi tetap mengedepankan

persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun pemaknaan identitas subjek tersebut akan mengalami perubahan kembali apabila relasinya diubah. Identitas subjek sebagai *suspect* COVID-19 akan mengalami dinamika atau perubahan apabila subjek tersebut telah mengalami kesembuhan dari penyakit COVID-19. Semasa menderita COVID-19, subjek tersebut memiliki identitas sebagai penderita COVID-19, tetapi identitas tersebut berubah ketika subjek telah sembuh dari COVID-19, yakni menjadi subjek yang identitasnya bukan lagi sebagai penderita COVID-19. Mengenai pembentukan identitas tersebut sebagaimana tampak pada gambar diagram alir berikut:



Gambar 1: Diagram alir pembentukan identitas subjek

Berdasarkan gambar di atas tampak identitas subjek bukanlah identitas yang utuh, menyeluruh, dan tidak mengalami perubahan. Pengidentifikasi subjek selalu berkaitan dengan relasi-relasi yang dikenakan pada subjek tersebut. Selain itu, pada gambar di atas juga tampak identitas yang relasional tersebut bukanlah identitas yang utuh. Identitas yang dibentuk oleh relasi antara subjek dengan penanda selain subjek selalu hadir sebagai identitas yang fragmentaris. Tidak ada kebenaran tunggal atau pemaknaan tunggal atas subjek. Subjek senantiasa berada pada dinamika pembentukan identitas. Oleh karena itu, perundungan dan diskriminasi sosial

yang dikenakan kepada setiap subjek anggota masyarakat Indonesia yang teridentifikasi COVID-19 adalah hal yang tidak tepat.

Selain itu, ketidaktepatan perilaku setiap anggota masyarakat Indonesia yang melakukan perundungan dan diskriminasi sosial terhadap anggota masyarakat Indonesia lainnya yang terkena identitas *suspect* COVID-19 juga disebabkan adanya asas tenggang rasa dan saling menghormati masyarakat Indonesia. Perundungan dan diskriminasi adalah bentuk penetapan batas dominasi yang dilakukan oleh seorang subjek terhadap subjek lainnya. Penetapan batas ini berdampak pada terbangunnya pemaknaan bahwa mereka yang menjadi *suspect* COVID-19 bukanlah bagian dari masyarakat Indonesia. Dalam tataran relasinya sebagai bagian dari penderita COVID-19, subjek penderita COVID-19 dapat diekskusi dari diskursus masyarakat Indonesia. Namun, dalam relasinya sebagai bagian masyarakat Indonesia, praktik ekskusi tersebut tidak tepat, karena identitas penderita tersebut tetap memiliki relasi sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Perundungan dan diskriminasi sosial harus di masa Pandemi COVID-19 ini harus dihilangkan karena merupakan pemaknaan yang salah. Oleh karena itu, perilaku tenggang rasa dan saling menghormati merupakan implementasi dari paradigma posmodern dan nilai-nilai kebhinekaan bangsa Indonesia yang harus tetap dijaga dan dijadikan dasar berperilaku. Perundungan dan diskriminasi sosial tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota masyarakat Indonesia pada masa Pandemi COVID-19.

Berdasarkan penjabaran di atas, tampak jika paradigma posmodern memiliki urgensi untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia di masa Pandemi COVID-19. Hal tersebut bukan saja untuk mencegah hadirnya konflik sosial di masyarakat. Namun, juga, untuk tetap menjaga imunitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi

persatuan dan kesatuan, tenggang rasa dan saling menghormati, serta keberagaman.

Kesimpulan

Paradigma posmodern merupakan paradigma yang hadir karena kegagalan proyek modern. Paradigma posmodern merupakan bentuk kritik atas kondisi modern yang telah mendegradasi kehidupan manusia. Secara umum, penolakan dan penyangkalan terhadap metanarasi, monolitik, sistem konvensi dan kearbitraran, serta penolakan dan penyangkalan pada objektivitas kebenaran, determinasi subjek dan pembatasan kebebasan merupakan unsur-unsur dalam paradigma posmodern. Di masa Pandemi COVID-19, paradigma posmodern memiliki urgensi untuk dipahami kembali dalam kesadaran masyarakat Indonesia. Hal tersebut karena posmodern sebagai sebuah paradigma dapat menguatkan kesadaran kehidupan berbangsa yang satu, utuh, dan berdaulat masyarakat Indonesia. Paradigma posmodern dapat membangkitkan dan menguatkan imunitas kebangsaan Indonesia sehingga tidak mengalami degradasi. Oleh karena itu, penggunaan paradigma posmodern sebagai dasar filosofi pembentukan perilaku masyarakat Indonesia di masa Pandemi COVID-19 perlu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Akbar S. 1992. *Postmodernism and Islam: Predicament and Promise*. London: Routledge.
- Appignanesi, Richard & Garrat, Christ. 1997. *Mengenal Posmodernisme*. (Diterjemahkan oleh Alfathri Adlin). Bandung: Mizan.
- Aziz, Imam (ed.). 2001. *Galaksi Simulacra: Esai-Esai Jean Baudrillard*. Jogjakarta: LKiS.
- Baudrillard, Jean. 2006. *Lupakan Postmodernisme*. (Diterjemahkan oleh Jimmy Firdaus). Jogjakarta: Kreasi Wacana.

- Hartono, Agustinus. 2007. *Skizoanalisis*. Jogjakarta: Jalasutra.
- Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal. 1999. *Hegemony and Socialist Strategy: Toward a Radical Democratic*. London: Verso.
- Lash, Scott. 1990. *The Sociology of Posmodernism*. London: Routledge.
- Liotard, Jean-Francois. 1984. *A Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Minneapolis: University of Minneasota Press.
- Muhadjir, Noeng. 2001. *Filsafat Ilmu*. Jogjakarta: Rakesarasin.
- Oetomo, Dede. 2009. "Refleksi Kritis Manusia Indonesia" dalam *Prisma* Vol. 28, No. 2, Oktober 2009.
- Piliang, Yasraf Amir. 1999. *Hiper-Realitas Kebudayaan*. Jogjakarta: LKiS.